

BUDAYA BAHARI DAM TRADISI NELAYAN DI INDONESIA

Yunandar

Fakultas Peternakan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstract

There are at least five phenomena which mark the complexity of maritime culture and fisherman tradition in Indonesia; social group of the maritime society, the development of economic sectors concerning sea products, social hierarchy in the daily maritime activities, the relationship between the elements of maritime culture and life sectors of the society, and the continuation and alteration of maritime culture's elements. In order to acquire a deep study on the complexity of maritime culture, there are several concepts used in this paper: Koentjaraningrat's concept of "three forms of culture", Sanjek's concept of "the dynamic culture and creation", and Vadya's concept of "contextual progressive explanatory method". The forms of maritime culture include the system of culture, belief, institution, and production technology. Meanwhile, the dynamics of maritime culture and fisherman tradition is determined not only by the internal factors but also the external forces, such as, innovation on technology, government policy, university interventions, nongovernmental organizations, donor institution, and regional, national, and even global market. Apparently, those external forces have brought negative impacts on the life of maritime society, marked by the decrease of economic prosperity, natural resources and sea environment. The negative impacts can be avoided by applying community-based management in the development of maritime culture.

Key Words: *maritime culture, fisherman tradition, community-based management.*

1. Pendahuluan

Sejumlah studi, antara lain dilakukan oleh Firth (1975), Acheson (1977 dan 1981), Andersen dan Wadel (1982), Ushijima dan Zayas (1994), Palsson (1991), dan Masyhuri (1996), menunjukkan bahwa fenomena (sosi) budaya bahari sangat kompleks. Kompleksitas budaya bahari dicirikan oleh sedikitnya lima fenomena sebagai berikut.

Pertama, kelompok-kelompok sosial kebaharian seringkali bukan sekedar kelompok-kelompok kerja yang merupakan sub-sub komunitas desa. Mereka bisa dikategorikan sebagai sub-sub etnis seperti ditunjukkan oleh adanya desa-desa nelayan Bugis, Mandar, Makassar, dan Madura di kawasan pesisir. Akan tetapi, bisa pula merupakan kelompok-kelompok etnis sepenuhnya seperti tampak pada desa nelayan Bajo di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan.

dan Sulawesi Tengah. Kelompok-kelompok sosial semacam itu bahkan bisa merupakan suatu negara atau kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai (Masyhuri, 1996). **dan** Kesultanan Buton (Schoorl, 1984). Kelompok-kelompok sosial yang ada di wilayah pesisir tidak hanya pelayar dan nelayan. Di negara-negara pantai di Eropa dan negara maju lain, dikenal berbagai kelompok sosial seperti awak kapal pengeruk dasar sungai dan perairan pantai, olahragawan laut yang beranggota para peselancar dan penyelam, marinir, dan organisasi **pencinta** lingkungan laut yang anggotanya berasal dari berbagai kota dan bahkan **dar**" berbagai negara yang berlainan (Ginkel dan Verrips, 1988).

Kedua, munculnya berbagai kategori sosial tersebut dikondisikan oleh perkembangan jenis-jenis usaha ekonomi yang terkait dengan laut, misalnya perikanan, pelayaran atau usaha transportasi laut, pertambangan, pariwisata

bahari, dan jasa pengamanan wilayah taut dan isinya. Para pelaku ekonomi kebaharian menerapkan berbagai gaya manajemen baik berupa ekstensifikasi dengan strategi diversifikasi usaha maupun intensifikasi dengan jenis usaha tunggal. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kebaharian yang melibatkan pemerintah seringkali mengacu **pada** kerangka pengembangan terpadu yang diidealkan akan menguntungkan setiap sektor. **Namun** usaha itu seringkali dilakukan secara **parsial** yang menjurus pada **gejala** persaingan dan konflik kepentingan, sehingga pada gilirannya berdampak buruk terhadap perkembangan usaha kecil milik rakyat dengan **manajemen** tradisional,

Ketiga, selain pelaku dan pengguna langsung, terdapat kategori-kategori sosial lain yang turut terlibat dalam setiap sektor ekonomi kebaharian. Perikanan, misalnya, merupakan sektor ekonomi yang cukup banyak jenisnya sesuai dengan spesies sumberdaya laut, tipe teknologi yang digunakan untuk mengeksploitasinya, dan skala investasi modal usaha. Sektor ini tidak hanya melibatkan kelompok nelayan, tetapi juga memerlukan peran serta para pembuat perahu dan alat tangkap, pedagang, pengusaha dan rentenir, koperasi dan bank, pasar dan tempat pelelangan ikan, instansi pemerintah yang terkait, petugas keamanan laut, peneliti dan praktisi, lembaga penyandang dan a, dan organ isiasi nonpemerintah. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan kekuatan eksternal yang mempengaruhi atau bahkan menentukan tatanan dan dinamika kehidupan sosial dan budaya kelompok sosia) kebaharian utama seperti nelayan dan pelayar.

Keempat, fenomena sosial budaya bahari tidak hanya tampak pada aspek-aspek budaya, tetapi diperlihatkan pula oleh kategori dan hirarki sosial penduduknya yang berbeda-beda. Fenomena budaya dari setiap kategori sosial mempunyai karakter kepribadian kebaharian masing-masing. Budaya bahari kelompok nelayan, misalnya, akan menunjuk-kan karakter yang berbeda dari kelompok awak

kapal angkutan, komunitas pembuat perahu/kapa), olahragawan laut, dan satuan marinir. Bahkan di antara kategori sosial yang sama bisa pula mempunyai karakter budaya bahari yang berlainan. Kefompok nelayan *rumpon* (Mandar), nelayan *bagang* (Bugis), penyelam teripang (Bajo, Bugis, Makassar) dan pemburu hiu (Bajo) yang semuanya berasal dari Sulawesi Selatan mempunyai karakter kebaharian yang berbeda-beda.

Kelima, kompleksitas fenomena kebaharian juga berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya bahari itu sendiri, baik akibat perkembangan yang bertumpu baik pada faktor-faktor internal maupun perkembangan yang didorong oleh kekuatan eksternal. Contoh proses perkembangan internal adalah perubahan tipe *bagang* tancap ke rakit/apung dan akhirnya menjadi *bagang* perahu di kalangan komunitas nelayan di Sinjai, Sulawesi Selatan. Dinamika kebaharian yang dipicu oleh faktor eksternal misalnya adalah masuknya teknologi baru berupa mesin. Teknologi baru ini tidak hanya mengakibatkan terjadinya motorisasi perahu yang menghilangkan fungsi layar dan dayung, tetapi juga mendorong transformasi struktura) kelompok-kelompok kerja nelayan dan jaringan pemasaran hasil tangkapan. Relasi antarbudaya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebaharian. Pengaruh tersebut dapat terjadi melalui difusi unsur-unsur budaya, seperti persebaran *rumpon* dari Majenne (Sulawesi Selatan), biAudari Buton (Sulawesi Tenggara), dan sebuah bentuk perahu tradisional dari Kalimantan yang dimodifikasi menjadi perahu tipe/'o'toro'di Bira (Bulukumba) dalam dua dekade terakhir. Relasi antarbudaya seringkali juga diikuti usaha memanipulasi identitas etnis baik secara temporal maupun permanen. Hal semacam ini dilakukan antara lain oleh sabagian besar masyarakat Bajo dalam rangka adaptasi sosial budaya dan mempertahankan tradisi seperti pengetahuan kelautan, pembuatan perahu, dan aturan bagi hasil. Kompleksitas fenomena sosial budaya kebaharian di Indonesia juga berkaitan dengan adanya kontradiksi antara pandangan emik dan

Sabda, *Vohme 1, Nomor 1, September 2006: 22-35*

etik. Di satu sisi mode eksploitasi sumberdaya laut oleh masyarakat setempat yang berlangsung di bawah kendali nilai-nilai dan pengetahuan lokal dianggap merefleksikan kearifan lokal yang perlu dipertahankan. Di sisi lain arus komersialisasi sumberdaya laut yang begitu deras mendorong berlangsungnya aktivitas eksploitasi yang kurang terkendali dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, lingkungan, dan sumberdaya laut. Gejala paternalisme yang melibatkan pemerintah, kalangan akademisi, dan organisasi nonpemerintah juga mempengaruhi tatanan dan dinamika sosial budaya lokal.

Dengan memperhatikan kompleksitas budaya kebaharian di atas, kajian terhadap fenomena sosial dan budaya bahari selanjutnya dilakukan secara muttidisipliner dan atau interdisipliner. Kajian yang demikian melibatkan bukan hanya antropologi atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya, tetapi juga ilmu-ilmu eksak seperti perikanan, kelautan, biologi, ekologi, dan teknik perkapalan, yang relevan dengan subjek kajian. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemilihan konsep kebudayaan. metode koleksi data yang lebih aplikatif, dan model analisis yang empiris. Hal-hal tersebut merupakan fokus pembahasan tulisan ini. Pembahasan metodologis mengacu pada bahan-bahan pustaka yang membicarakan tentang konsep-konsep kebudayaan. Deskripsi tentang wujud kebudayaan bahari didasarkan pada data etnografis tentang komunitas nelayan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

2. Budaya Bahari: Konsep dan Model Analisis

Kompleksitas budaya bahari, khususnya berkaitan dengan keragaman kategori sosial yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan keragaman mata pencaharian yang berhubungan dengan (aut, menjadi alasan utama penggunaan istilah "budaya bahari", Istilah tersebut dirasakan lebih tepat dibandingkan istilah lain, yaitu "budaya maritim" atau "budaya marin". Istilah "budaya maritim"

menurut linguistik Eropa mengacu kepada kegiatan pelayaran, sedangkan istilah "budaya marin" merujuk kepada aktivitas penangkapan ikan semata (Nishimura, 1976). Jika kedua istilah tersebut diaplikasikan secara konsisten, kedua wilayah studi itu akan menjadi eksklusif yang berarti bagian-bagian tertentu dari kedua subjeknya tereduksi. Konsep budaya bahari mampu meliputi semua fenomena baik yang tercakup di dalam konsep budaya maritim maupun budaya marin. Penentuan ruang lingkup kajian dapat ditakukan dengan memfokuskan kajian pada fenomena sosial budaya bahari tertentu.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena budaya bahari yang kompleks, kiranya cukup memadai bila digunakan konsep "tiga wujud kebudayaan" (sistem gagasan, sistem sosial, dan budaya material) dari Koentjaraningrat daripada melakukan reduksi wujud kedua dan ketiga seperti dilakukan para antropolog kognitif (Goodenough, 1961: 522; Keesing, 1994: 68) dan simbolik (Geertz dalam Harris, 1968: 20) atau secara berlebihan menekankan pada pertimbangan rasional biaya dan keuntungan (*cost-benefit considerations*) seperti dilakukan para penganut materialisme budaya (Harris, 1968:19). Definisi kebudayaan yang secara jelas mencakup ketiga wujud tersebut dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan merupakan "keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar" (1980:193).

Meskipun seringkali dikritik oleh para penganut kognitivisme dan simbolisme, karena dinilai mencakup segalanya, tetapi konsep tiga wujud kebudayaan merupakan model analisis yang memadai. Pendapat ini pernah diungkapkan Ignas Kleden dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia di Jakarta tahun 1996. Konsep tiga wujud kebudayaan tercermin pula dalam pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan. Mengacu kepada konsep kebudayaan tersebut, maka budaya bahari dapat dipahami sebagai sistem

gagasan, perilaku dan tindakan, dan sarana dan prasarana fisik yang digunakan oleh masyarakat bahari untuk mengelola sumberdaya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, budaya bahari mengandung unsur-unsur berupa sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, aturan, simbol komunikatif, kelembagaan, teknologi, dan seni yang berkaitan dengan laut.

Untuk mengungkapkan keberlanjutan dan perubahan budaya bahari dapat digunakan konsep "kreasi dan dinamika" dari Sanjek dan model penjelasan "kontekstual progresif" dari Vayda (1992). Menurut Sanjek (dikutip Borofsky, 1994: 313), kebudayaan "*is...under continuous creation-fluid, interconnected, diffusing, interpenetrating, homogenizing, diverging, hegemonizing, resisting, reformulating, creolizing, open rather than closed, partial rather than total, crossing its own boundaries, persisting where we don't expect it to, and changing where we do*". Tampaknya konsep dinamika budaya ini relatif bisa mencakup semua sisi realitas sosial budaya, sehingga perangkat-perangkat proses kreasi dan dinamika tertentu, kalau bukan sepenuhnya, bisa digunakan sebagai model untuk mendeskripsikan dinamika budaya bahari. Tidak menjadi masalah apakah proses kreasi dan dinamika budaya yang dimaksudkan Sanjek berada pada dimensi kognitif atau simbolik, meliputi pikiran dan perilaku, atau tiga wujud kebudayaan mencakup sistem gagasan, perilaku sosial, dan kebudayaan material. Memadukan berbagai kelebihan dari berbagai perspektif, termasuk yang saling berlawanan sekalipun. Kalau memang relevan dengan masalah yang sedang dikaji merupakan langkah penyelamatan jika tidak mau menanggung risiko dengan mengandalkan suatu perspektif teoritis tunggal (Bernard, 1994: 174-175).

3. Wujud dan Karakteristik Budaya Komunitas Nelayan

Hubungan manusia dengan lingkungan laut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan

tentang makna dan fungsi lingkungan tersebut bagi kehidupan mereka. Gagasan yang muncul ialah perlunya kerja sama dan pembentukan lembaga untuk mengusahakan pemenuhan berbagai keperluan dasar seperti sarana/prasarana fisik berupa perahu/kapal, sarana eksploitasi sumberdaya, dan modal. Intinya, pola pengelolaan sumberdaya dan jasa-jasa laut melibatkan sistem budaya, kepercayaan, pranata, dan teknologi eksploitasi sumberdaya.

3.1 Sistem Budaya Bahari

3.1.1 Pengetahuan tentang Biota Laut dan Musim

Nelayan memiliki pengetahuan mencakup antara lain pengetahuan tentang biota laut bernilai ekonomi tinggi, lokasi dan sarang ikan, musim, tanda-tanda (di laut, darat, dan angkasa/perbintangan), dan lingkungan sosial budaya. Pengetahuan tentang biota laut bernilai ekonomi tinggi meliputi: spesies-spesies ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, gurila, penyu dan kerang/siput-siputan (*gastropoda*), teripang, akar bahar, tali arus, rumput laut (*seagrass*), dan berbagai jenis karang.

Menurut laporan *Weivaartcommissie* (1905: 44-46), pada awal abad XX nelayan Jawa dan Madura masing-masing telah mengenal 77 dan 83 jenis ikan. Sementara itu, nelayan Pulau Sembilan di Sulawesi Selatan mengenal kurang lebih 40 jenis teripang, beberapa di antaranya jika diurutkan dari yang harganya termahal adalah teripang jenis *koro*, *buang kulit*, *tai kongkong*, *batu*, *kassi*, *nenas*, dan *pandang*. Di samping itu, nelayan Pulau Sembilan juga mengenal berbagai jenis kerang seperti *mutiara*, *tola*, *batu laga*, *mata tujuh*, *kima*; dan beberapa jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti: ikan karang terutama jenis *sunu* (*red snapper*), *kerapu* (*grouper*), *faccukang/ fangkoe* (*napoleon*), hiu (yang diambil siripnya); dan udang/«ster jenis *mutiara*, *bambu*, *kipas*, dan *setang*. Spesies-spesies tersebut merupakan komoditas ekspor. Beberapa ikan pelagis, antara lain: layang, cakalang/tongkol, dan *banjara/sarisi* (sardin) merupakan komoditas yang laku di pasar lokal dan regional.

Nelayan juga mengetahui dengan baik lokasi penangkapan (*fishing ground*) dan tetak sarang ikan. Nelayan pancing ikan karang Liang-liang di Pulau Sembilan, misalnya, mempunyai pengetahuan tentang lokasi penangkapan dan sarang-sarang ikan sivnudi *taka-taka* (gugusan karang) antara lain *taka* Malambere selatan, Pasi' loangnge utara dan selatan, Pangami ujung timur, Limpoge utara dan tengah. Lakaranga utara dan selatan, Lagenda timur, Laborao timur, dan *taka* Alusie timur.

Kegiatan penangkapan berbagai spesies biota laut juga harus didukung dengan pengetahuan tentang musim. Komunitas nelayan di perairan Nusantara sekurang-kurangnya mengetahui tiga pola musim yang menentukan waktu-waktu intensif dan sepi aktivitas pemanfaatan sumberdaya (aut dan peiyaran, yaitu musim barat, musim timur, dan musim pancaroba. Musim barat berlangsung pada bulan 12-6 (Desember-Juni). Bulan-bulan tersebut tidak atau kurang memungkinkan berlangsungnya aktivitas kenelayan atau peiyaran rakyat yang intensif, karena pada musim sering barat terjadi hujan tebat, angin/badai besar, dan arus kuat dari arah barat ke timur. Musim timur berlangsung antara bulan 7-12 (Juli-Desember) yang ditandai dengan angin dan arus agak (emah dari timur ke barat. Hal ini memberikan peluang besar bagi nelayan dan peiyaran rakyat untuk beroperasi secara intensif. Antara musim barat dan musim timur terdapat musim peralihan yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, yaitu antara bulan 5-7 (Mei-Juli). Selama musim peralihan keadaan angin dan ombak tidak dapat diprediksi, sehingga kadang-kadang kondisi perairan yang sen-Tula tenang tiba-tiba berubah ganas dan berbahaya bagi kegiatan nelayan dan peiyaran rakyat. Di beberapa perairan terbuka di kawasan Indonesia timur, termasuk Sulawesi Selatan, kecuali sebagian kecil Teluk Bone, sangat sulit dimasuki oleh nelayan selama musim peralihan tersebut.

Pengetahuan tentang musim tidak hanya didasarkan pada "perilaku" angin dan ombak,

tetapi didasarkan pula pada perilaku ikan. Ikan *sunu6an* kerapu, misalnya, akan muncul pada bulan 10-4 (Oktober-April). Oleh karena itu, nelayan di Pulau Sembilan menganggap bulan-bulan Oktober sampai dengan April sebagai masa panen ikan *sunu* dan kerapu. Mereka menangkap kedua jenis ikan itu pada paruh kedua di setiap bulan musim karena mereka mengetahui bahwa pada saat itulah ikan *sunu* dan kerapu muncul, sedangkan selama 15 hari pertama dari setiap bulan musim dikenal sebagai waktu bersembunyi ikan-ikan.

Bagi para nelayan, pengetahuan mengenai tanda-tanda selama mereka berada di laut seperti bunyi kemudi perahu dan cahaya laut, serta tanda-tanda dari angkasa berupa kilat dan awan hitam menjadi penting untuk menjamin keselamatan mereka. Tanda-tanda tersebut berhubungan dengan berbagai kejadian yang mungkin dapat dialami selama mereka menangkap ikan di laut, misalnya datangnya angin kencang, angin tornado, adanya batu karang, atau munculnya makhluk berbahaya seperti gurita. Pelayar atau nelayan Bugis dan Makassar mengandalkan kemampuan indra *pakkita* (penglihatan), *parengkalinga* (pendengaran), *paremmau* (penciuman), *panedWng*(firasat), **dan** *tentuang* (keyakinan) untuk menangkap tanda **atau** isyarat bahaya di laut. **Di** samping itu, pengetahuan tentang musim dan bahaya di laut **juga** didasarkan pada pengetahuan tentang astronomi menurut tata letak bintang-bintang. Sebagai contoh adalah bintang *suto* baiv/Fyang muncul di sebelah timur dan menandakan akan datangnya angin timur; *wara-waraE* yang menandakan akan datangnya panas terik; *tanraE* yang menandakan akan datangnya angin kencang; *manuE* yang menandakan musim kemarau sudah datang; /ambaruE yang menandakan musim barat mulai datang; dan *tellu-tellu* yang dijadikan petunjuk untuk bertayar ke arah barat atau ke timur (Hamid, 2003).

Pengetahuan nelayan atau pelayar mengenai lingkungan sosial budaya dihasilkan oleh keterlibatan mereka dalam proses interaksi baik dalam bentuk kerja sama maupun persaingan memperebutkan peluang-peluang

penguasaan sumberdaya. Para pedagang hasil laut, pengusaha, pemilik modal, TPI, dan *bakul* merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, transaksi, dan seringkali juga bennusuhan dengan nelayan. Kelompok-kelompok nelayan lain yang mengusahakan jenis tangkapan yang sama juga diposisikan sebagai pesaing. Bagi nelayan Pulau Sembilan, kelompok-kelompok sas/di Maluku dan Papua **serta** personel keamanan laut yang terdiri atas Jagawana, Babinsa, Minmas/KP3, dan Angkatan Laut di satu sisi merupakan pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama. Namun di sisi lain nelayan Pulau Sembilan juga menghindari atau sekurang-kurangnya membatasi diri dalam berhubungan dengan **pihak-pihak** tersebut.

3.1.2 Gagasan tentang Laut

Gagasan nelayan tentang laut cukup bervariasi. Ada masyarakat nelayan yang menganggap laut mempunyai isi yang melimpah dan diperuntukkan bagi semLia; sumberdaya laut untuk semua, tetapi hanya sebagian yang bisa memanfaatkannya; dan ada pula yang berpandangan bahwa laut itu luas, **tetapi** tidak semua bagian bisa dimasuki. Isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua adalah salah satu gagasan yang telah melekat dalam pandangan sebagian besar masyarakat nelayan Bugis, Bajo, Makassar, Buton, Mandar, dan mungkin juga Madura. Menurut Horridge (1986: 3), masyarakat-masyarakat nelayan **tersebut** merupakan pewaris budaya maritim dari Melayu-Pofonesia yang mempunyai **keahlian** khusus sebagai pembuat dan sekaligus pecinta perahu sejak 2000 tahun yang lalu. Beberapa nelayan Bugis dari Pulau Sembilan mengungkapkan gagasannya seperti berikut.

"Ikan **di laut** melimpah **dan** tidak **akan** habis sepanjang/selama daun-daun pohon di darat belum habis. Laut yang luas dengan segala isinya tidak ada orang tertentu yang memilikinya. Ini diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia dengan doa dan usaha keras. Dengan teknologi eksploitasi

apa saja tidak akan menghabiskan isi laut, kecuali hanya mengurangi populasinya, Usahakan dan manfaatkanlah rahmat/ berkah atau pemberian Yang Maha Pencipta tersebut. Janganlah memancing ikan-ikan kecil di pinggir laut, tetapi pergilah ke laut untuk menangkap ikan-ikan besar agar usaha berkembang" (Indar dan Lampe, 2002).

Gagasan tentang sumberdaya laut untuk semua, tetapi hanya sebagian oranQ yang bisa memanfaatkannya dianut antara lain oleh masyarakat nelayan Bugis, Makassar, Bajo, dan Buton. Hal ini bisa ditunjukkan oleh sekurang-kurangnya tiga kategori tentang akses pemanfaatan sumberdaya laut yang dimiliki oleh kelompok-kelompok nelayan tertentu. Ketiga kategori tersebut adalah (1) masyarakat nelayan tertentu bernasib baik dan mempunyai akses pada pemanfaatan sumberdaya laut; (2) akses sebagian masyarakat nelayan pada pemanfaatan sumberdaya laut di lokasi-lokasi yang sulit dan dianggap keramat; dan (3) kontrol dan dominasi para *pongawa darat*, pedagang lokal, dan pengusaha besar memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada yang didapatkan oleh keluarga-keluarga nelayan pada umumnya.

Gagasan mengenai laut luas, tetapi tidak semua bagian bisa dimasuki merupakan pandangan budaya yang dianut oleh sebagian masyarakat nelayan Bugis, Makassar, dan Bajo. Pandangan tersebut tumbuh dari pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan institusi-institusi pengelola sumberdaya laut, misalnya kepemilikan individual, komunal, dan kontrol negara.

Daftar prioritas kebutuhan dalam budaya komunitas-komunitas nelayan turut memberikan dampak pada eksploitasi sumberdaya ikan. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa keluarga-keluarga nelayan Pulau Sembilan di Sulawesi Selatan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan subsisten, membayar utang, mengembangkan usaha, dan naik haji ke Mekkah.

3.2 Sistem Keyakinan atau Kepercayaan

Nelayan di banyak tempat di dunia mempraktikkan keyakinan-keyakinan yang bersumber dari agama atau kepercayaan yang dianutnya sebagai mekanisme pemecahan persoalan-persoalan lingkungan fisik dan sosial yang dihadapi sehari-hari. Sebagian besar nelayan Bugis, Bajo, Buton, Makasar, dan Madura yang beragama Islam percaya kepada kekuasaan dan takdir Allah. Banyak sedikitnya hasil yang mereka peroleh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut senantiasa dikembalikan kepada takdir. Rintangan berupa ombak besar, dalamnya laut yang diselami pencari teripang, dan angkernya banyak tempat yang kaya sumberdaya, semuanya dihadapi dan dilawan dengan keyakinan tentang adanya suatu kekuatan yang lebih menentukan, yaitu Tuhan. Keberanian nelayan Sulawesi Selatan dan Tenggara menjelajahi perairan Nusantara dikendalikan oleh keyakinan tersebut yang dipadukan dengan pengalaman dan keterampilan berlayar serta etos ekonominya yang kuat. Sebagian besar komunitas nelayan di NTT, Maluku, dan Papua mengandalkan upacara penyembahan roh-roh halus dan praktik-praktik magis dalam rangka memperoleh rezeki dari laut dan menghindari bahaya-bahaya di laut.

3.3 Sistem Kepranataan

Di kalangan komunitas bahari dari negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, terdapat sekurang-kurangnya lima pranata tradisional (*traditional institution*) yang tetap bertahan, yaitu pranata kekerabatan (*kinship/domestic institution*), pranata agama/kepercayaan (*religious institution*), pranata ekonomi (*economic institution*), pranata politik (*political institution*), dan pranata pendidikan (*educational institution*). Pranata merupakan seperangkat aturan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang difungsikan sebagai mekanisme penyesuaian diri dengan lingkungan dan untuk memecahkan persoalan sosial ekonomi yang mendesak. Dengan demikian, pranata menjadi bagian dari dan menandai gaya pengelolaan (*management style*).

Berikut ini diberikan dua contoh pranata ekonomi masyarakat bahari yang berorientasi pada kerjasama dan hak pemanfaatan sumberdaya laut.

3.3.1 Ponggawa-sawi

Dalam masyarakat nelayan, kelompok kerja pada umumnya juga berperan mengatur berbagai kegiatan ekonomi baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Di kalangan masyarakat nelayan Bugis, Makasar, dan Bajo kelompok kerja nelayan dikenal dengan sebutan *ponggawa-sawi*

Pengaturan tata-cara perekrutan tenaga kerja dan pembagian kerja di antara kelompok-kelompok nelayan ditangani oleh *ponggawa-sawi*. Selain itu, *ponggawa-sawi* juga berperan mengatur cara-cara nelayan memperoleh modal (berfungsi menyerupai koperasi), sebagai pasar, mengatur penyelesaian urusan utang-piutang, menetapkan aturan bagi hasil, jaminan sosial ekonomi nelayan, dan bahkan berperan sebagai wadah sosialisasi kelompok-kelompok nelayan. Fungsi dan peranan *ponggawa-sawi* ini bisa disejajarkan dengan *juragan-pandega* di Jawa atau *tanase-wasanaedi* Maluku.

Di Maluku, *tanase-wasanaedi* muncul sebagai respons masyarakat nelayan setempat terhadap permintaan hasil-hasil laut di pasar global sejak ratusan tahun silam (Zerner, 1994). Alasan yang sama tampaknya berlaku bagi munculnya *ponggawa-sawi* di Sulawesi Selatan. Lembaga ini lahir sebagai suatu bentuk tanggapan dari para pelaut dan nelayan terhadap kebutuhan hasil-hasil laut komoditas ekspor sejak abad ke-13 atau ke-14.

3.3.2 Hak Kepemilikan atas Sumberdaya dan Wilayah Perikanan

Lautan yang luas dengan kekayaan sumberdaya hayati dan non-hayati yang dikandungnya merupakan faktor produksi terpenting bagi pengembangan dan

Sabda, Volume 1, Nomor 1, September 2006: 22 - 35
 bertahannya usaha ekonomi perikanan. Pengaturan pemanfaatan faktor produksi tersebut didasarkan pada berbagai bentuk hak kepemilikan atau penguasaan sebagai berikut. **a*** Hak milik bersama (*common property light*). **b.** Hak milik individu/keluarga (*individual/family property right*).
c. Hak milik pribadi (*private property right*) **d.** Hak milik negara (*state property right*) ©. Praktik pemanfaatan secara bebas/terbuka (*open access/use*).

Di Indonesia, **berbagai bentuk hak penguasaan** wilayah dan sumberdaya laut **seperti** tersebut di atas dapat ditemukan di **beberapa** tempat, **antara** lain:

- a.** Di Maluku, hak kepemilikan komunal **atas** wilayah darat dan pantai yang disebut sas; dijumpai antara lain di pantai Ambon dan Haruku serta di desa-desa di Putau Saparua seperti Desa Nolloth, Ihamahu, Saparua, dan Porto. Institusi tersebut telah dipraktikkan sejak kurang lebih 130 tahun lalu, mendahului tumbuhnya kesadaran mengenai perlunya konservasi laut di negara-negara Barat yang baru dimulai sekitar 105 tahun lalu. Institusi sas/juga berlaku dan hingga kini masih bertahan di Papua. Namun kebijakan pemerintah Indonesia sejak beberapa dekade terakhir dan pertumbuhan ekonomi pasar cenderung mengikis dan melemahkan peranan institusi lokal tersebut (Zerner, 1984).
- b.** Daerah-daerah di sepanjang pantai utara Jawa dan Madura hingga periode terakhir kotonialisme Belanda dieksploitasi dengan menggunakan model pengelolaan yang didasarkan pada hak kepemilikan komunal pada tingkat distrik dan desa. Eksploitasi sumber daya laut dengan model tersebut mampu menjamin kelangsungan dan keseimbangan lingkungan pantai dan laut. Ironisnya, di masa Indonesia merdeka institusi tersebut justru mulai melemah dan mengarah pada kemusnahan.

- c.** **Seperti** di **Jawa**, sistem pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perairan pantai **di** Aceh dan Sumatra Selatan secara komunal bertahan **hingga** berakhirnya kekuasaan Pemerinlahan Hindia-Belanda.
- d.** Di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, praktik pemanfaatan sumberdaya laut dalam dan pesisir pada umumnya diatur **secara** terbuka (*open access/use*). Memang masih ada juga beberapa masyarakat di tingkat desa dan dusun di daerah Gorontalo, Teluk Banggai, Danau Tempe, yang menguasai *taka* di gugusan karang di Bulukumba Barat berdasarkan hak kepemilikan komunal. Demikian halnya di Selayar, terdapat sebuah wilayah komunal taut yang melibatkan upacara komunal tahunan,
- e.** Usaha perikanan dengan teknik *rumpon* dan *bagang* yang dipraktikkan nelayan Bugis, Jawa, dan Madura di perairan NTT. Maluku, Papua, dan Makassar, merupakan praktik pemanfaatan secara individual.
- f.** Di kawasan timur Indonesia berkembang perusahaan-perusahaan perikanan tongkol **milik swasta yang** mempunyai hak **penguasaan atas** gugusan lokasi perairan **laut** dalam **berdasarkan** lisensi dari **pemerintah**.
- g.** Sejak dekade 1980-an pemerintah Indonesia menetapkan beberapa wilayah perairan sebagai kawasan lindung, misalnya Taman Laut Bunaken, Takabonerate, Pulau Seribu, dan wilayah perairan lain di Maluku dan Papua. Penetapan pemerintah terhadap suatu wilayah perairan sebagai kawasan lindung merupakan bentuk penguasaan berdasarkan pemikiran bahwa wilayah tersebut merupakan hak milik negara, Kawasan lindung terbagi ke dalam beberapa zona. yaitu zona inti (*sanctuary zone*), zona penyangga, zona pemanfaatan tradisional, dan zona pemanfaatan intensif yang berada di luar kawasan. Penguasaan negara seperti ini dimaksudkan untuk menyelamatkan ekosistem-ekosistem laut

Sobc/o/ Vo/i/me // Nomor // September 2006: 22 - 35.

khususnya terumbu karang yang spesies-spesies utamanya mulai terancam. Di samping itu Juga untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan oleh masyarakat **penggunanya.**

Berdasarkan berbagai hasil survei dapat diketahui bahwa kemerosotan sumberdaya biota dan nonbiota serta kerusakan ekosistem laut sebagian besar disebabkan oleh praktik pemanfaatan secara terbuka/bebas. Penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara bebas dan juga *private* berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan permintaan komoditas hasil-hasil laut di pasar regional dan global dewasa ini.

Aturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara terbuka (*common property right/open use*) menyebabkan suatu lokasi dieksploitasi secara bersama-sama. Sebagai contoh adalah kawasan *taka* Pulau Sembilan yang bukan hanya dieksploitasi oleh nelayan setempat, tetapi juga oleh kelompok-kelompok nelayan dari desa-desa pantai di Teluk Bone seperti Sinjai, Bone, Luwu. dan Bulukumba Timur. Sejak tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok nelayan dari daerah lain yang turut mengeksploitasi kawasan *taka* Pulau Sembilan, yaitu: nelayan dari Makassar, Pangkep, dan Takalar, penyelam teripang dan mutiara dari Selayar, pencari kerang mata tujuh dari Buton dan Palu, dan nelayan ikan hias serta pemburu penyud dari Bali. Jumlah kelompok yang mengeksploitasi *taka* tersebut semakin bertambah banyak ketika sejak tahun 2000 hingga sekarang para penyelam teripang dari Madura beroperasi di sana.

3.4 Sistem Teknologi Kebaharian

Bagi masyarakat pesisir di Nusantara, sektor ekonomi perikanan dan usaha transportasi/pelayaran masih menjadi andalan. Keberadaan sektor ini didukung oleh teknologi pelayaran dan penangkapan ikan tradisional, **salah** satunya adalah perahu. Perahu nelayan tradisional di Indonesia pada umumnya **menjadi salah satu identitas dari kelompok etnis**

yang menghasilkan atau menggunakannya. Oleh karena itu, dikenal tipe-tipe perahu nelayan tradisional seperti *Pinisi* Bugis, *Patorani* Makasar, *Lambo* Buton Sandeq, *Lam£>odan Pangkur* serta BagoMandar, *Bagan Jofforo* Bugis (tipe terbaru, akhir 1980-an), *Janggolan* Madura, *Janggolan* Bali. *Prau Jaring* Madura, *Nade* Sumatera, dan *Lis'alis*, *Golekan*, *Lethlell*, *Mayang*, dan *Ju'o/ng* Jawa.

Salah satu ciri khas perahu tradisional di Jawa dan Bali ialah adanya ukiran dan gambar binatang yang memenuhi badan perahu dengan menggunakan kombinasi warna yang mengandung berbagai makna simbolik. *Pinisi* merupakan salah satu tipe perahu Sulawesi Selatan yang mempunyai konstruksi bagus namun miskin hiasan baik yang berbentuk ukiran maupun gambar dengan berbagai motif dan warna. Konstruksi perahu *Pinisi* ini lebih mengutamakan daya muat, keseimbangan, dan kecepatan. Sejak awal dekade 1970-an, perahu-perahu tradisional di Sulawesi Selatan mulai dilengkapi dengan motor tempel dan motor dalam selain teknologi penangkapan ikan yang lain.

Menurut van Kampen (1909), teknologi yang digunakan dalam penangkapan ikan di kalangan masyarakat nelayan Nusantara pada umumnya terdiri atas: (1) *net* atau jaring. Nelayan di Sulawesi Selatan menyebutnya dengan istilah *panjak*, *gae*, *tanra*, atau *panambe*; (2) *pancing*, yang di kalangan masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan dibedakan menjadi *pancing labuh*, *pancing rintak*, *pancing tonda*, dan *pancing kedokedo'*; (3) perangkap, yang oleh masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan disebut dengan nama *bubu*, *sero*, dan *belle'*; (4) alat tusuk, yang oleh nelayan di Sulawesi Selatan disebut sebagai *tombak*, *pattek*, dan *ladung*; dan (5) peralatan lainnya, misalnya adalah bahan peledak dan obat bius ikan. Jenis-jenis peralatan tangkap yang telah disebutkan oleh van Kampen masih dapat dilengkapi dengan (6) linggis dan parang; (7) menangkap atau memungut ikan dengan tangan; dan akhir-akhir ini nelayan di Sulawesi Selatan juga telah melengkapi peralatan tangkap mereka dengan (8) alat selam yang

Sahda, Volume I, Nomor 1, September 2006: 22 - 35

bertahannya usaha ekonomi **perikanan**. **Pengaturan pemanfaatan faktor** produksi tersebut didasarkan pada berbagai bentuk **hak kepemilikan atau penguasaan sebagai berikut**. **a. Hak milik bersama** (*common property right*).

b. Hak milik individu/keluarga (*individual/family property right*).

c. Hak milik pribadi (*private property right*) **ct.** Hak milik negara (*state property right*)

e. Praktik pemanfaatan secara bebas/terbuka (*open access/use*).

Di Indonesia, berbagai bentuk hak penguasaan wilayah dan sumberdaya laut seperti tersebut di atas dapat ditemukan di beberapa tempat, antara lain:

a. Di Maluku, hak kepemilikan komunal atas wilayah darat dan pantai yang disebut *sas*/ dijumpai antara lain di pantai Ambon dan Haruku serta di desa-desa di Pulau Saparua seperti Desa Nolloth, Ihamahu, Saparua, dan Porto. Institusi tersebut telah dipraktikkan sejak kurang lebih 130 tahun lalu, mendanului tumbuhnya kesadaran mengenai perlunya konservasi laut di negara-negara Barat yang baru dimulai sekitar 105 tahun lalu. Institusi *sas*/juga berlaku dan hingga kini masih bertahan di Papua. Namun kebijakan pemerintah Indonesia sejak beberapa dekade terakhir dan pertumbuhan ekonomi pasar cenderung mengikis dan melemahkan peranan institusi lokal tersebut (Zerner, 1984).

b. Daerah-daerah di sepanjang pantai utara Jawa dan Madura hingga periode terakhir kolonialisme Belanda dieksploitasi dengan menggunakan model pengelolaan yang didasarkan pada hak kepemilikan komunal pada tingkat distrik dan desa. Eksploitasi sumber daya laut dengan model tersebut mampu menjamin kelangsungan dan keseimbangan lingkungan pantai dan laut. Ironisnya, di masa Indonesia merdeka institusi tersebut justru mulai melemah dan mengarah pada kemusnahan.

C. Seperti di Jawa, sistem pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perairan pantai di Aceh dan Sumatra Selatan secara komunal bertahan hingga berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Hindia-Belanda.

d. Di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, praktik pemanfaatan sumberdaya laut dalam dan pesisir pada umumnya diatur **secara** terbuka (*open access/use*). **Memang** masih **ada** juga beberapa masyarakat **di** tingkat **desa** dan dusun di daerah Gorontalo, Teluk Banggai, Danau Tempe, yang menguasai *taka* di gugusan karang **di** Bulukumba Barat berdasarkan **hak** kepemilikan komunal. Demikian halnya **di** Selayar, terdapat sebuah wilayah komunal laut yang melibatkan upacara **komunal** tahunan.

e. Usaha perikanan **dengan** *teknik rumpon* dan *bagang* yang dipraktikkan nelayan Bugis, Jawa, dan Madura di perairan **NTT**, Maluku, Papua, dan Makassar, merupakan praktik pemanfaatan secara individual.

f. Di kawasan timur Indonesia berkembang perusahaan-perusahaan perikanan tongkol milik swasta yang mempunyai hak penguasaan atas gugusan lokasi perairan **laut dalam** berdasarkan lisensi dari **pemerintah**.

g. Sejak **dekade** 1980-an pemerintah **Indonesia** menetapkan beberapa wilayah **perairan** sebagai kawasan lindung, misalnya Taman Laut Bunaken, Takabonerate. Pulau Seribu, dan wilayah perairan lain di Maluku dan Papua. Penetapan pemerintah terhadap suatu wilayah perairan sebagai kawasan lindung merupakan **bentuk** penguasaan **berdasarkan** pemikiran bahwa wilayah **tersebut** merupakan hak milik negara. Kawasan lindung **terbagi** ke dalam **beberapa** zona, yaitu **zona** inti (*sanctuary zone*), **zona** **penyangga**, zona pemanfaatan tradisional, dan **zona** pemanfaatan intensif **yang** berada di luar kawasan. Penguasaan negara seperti **ini** dimaksudkan untuk **menyelamatkan ekosistem-ekosistem** laut

Sdhda, Volume 1, Nomor 1, September 2006: 22-35

khususnya terumbu karang yang spesies-spesies utamanya mulai terancam. Di samping itu juga untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan oleh masyarakat penggunaannya.

Berdasarkan berbagai hasil survei dapat diketahui bahwa kemerosotan sumberdaya biota dan nonbiota serta kerusakan ekosistem laut sebagian besar disebabkan oleh praktik pemanfaatan secara terbuka/bebas. Penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya taut secara bebas dan juga *private* berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan permintaan komoditas hasil-hasil laut di pasar regional dan global dewasa ini.

Aturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara terbuka (*common property right/open use*) menyebabkan suatu lokasi dieksploitasi secara bersama-sama. Sebagai contoh adalah kawasan *taka* Pufau Sembilan yang bukan hanya dieksploitasi oleh nelayan setempat, tetapi juga oleh kelompok-kelompok nelayan dari desa-desa pantai di Teluk Bone seperti Sinjai, Bone, Luwu, dan Bulukumba Timur. Sejak tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok nelayan dari daerah lain yang turut mengeksploitasi kawasan *taka* Pulau Sembilan, yaitu: nelayan dari Makassar, Pangkep, dan Takalar, penyelam teripang dan mutiara dari Selayar, pencari kerang mata tujuh dari Buton dan Palu, dan nelayan ikan hias serta pemburu penyu dari Ball. Jumlah kelompok yang mengeksploitasi *taka* tersebut semakin bertambah banyak ketika sejak tahun 2000 hingga sekarang para penyelam teripang dari Madura beroperasi di sana.

3.4 Sistem Teknologi Kebaharian

Bagi masyarakat pesisir di Nusantara, sektor ekonomi perikanan dan usaha Iran sportasi/pelayaran masih menjadi andalan. Keberadaan sektor ini didukung oleh teknologi pelayaran dan penangkapan ikan tradisional, salah satunya adadah perahu. Perahu nelayan tradisional di Indonesia pada umumnya menjadi salah satu identitas dari kelompok etnis

yang menghasilkan atau menggunakannya. Oleh karena itu, dikenal tipe-tipe perahu nelayan tradisional seperti *Pinisi* Bugis, *Patorani* Makasar, *Lambo* Buton Sandeq, *Lambodan Pangkur* serta *BagoMandar*, *Bagan Jolloro* Bugis (tipe terbaru, akhir 1980-an), *Janggolan* Madura, *Janggolan* Ball, *Prau Jaring* Madura, *Nade* Sumatera, dan *Lis-alis*, *Golekan*, *Lef/let*, *Mayang*, dan *Jukung* Jawa.

Salah satu ciri khas perahu tradisional di Jawa dan Bali ialah adanya ukiran dan gambar binatang yang memenuhi badan perahu dengan menggunakan kombinasi warna yang mengandung berbagai makna simbolik. *Pinisi* merupakan salah satu tipe perahu Sulawesi Selatan yang mempunyai konstruksi bagus namun miskin hiasan baik yang berbentuk ukiran maupun gambar dengan berbagai motif dan warna. Konstruksi perahu *Pinisi* ini lebih mengutamakan daya muat, keseimbangan, dan kecepatan. Sejak awal dekade 1970-an, perahu-perahu tradisional di Sulawesi Selatan mulai dilengkapi dengan motor tempel dan motor dalam selain teknologi penangkapan ikan yang lain.

Menurut van Kampen (1909), teknologi yang digunakan dalam penangkapan ikan di kalangan masyarakat nelayan Nusantara **pada** umumnya terdiri atas: (1) *net* atau jaring. Nelayan di Sulawesi Selatan menyebutnya dengan istilah *panjak*, *gae*, *lanra*, atau *panambe*; (2) *pancing*, yang di kalangan masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan dibedakan menjadi *pancing labuh*, *pancing rintak*, *pancing tonda*, dan *pancing kedokedo'*; (3) perangkap, yang oleh masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan disebut dengan nama *bubu*, *sero*, dan *belle'*; (4) alat tusuk, yang oleh nelayan di Sulawesi Selatan disebut sebagai *tombak*, *pattek*, dan *ladung*; dan (5) peralatan lainnya, misalnya adaiah bahan peledak dan obat bius ikan. Jenis-jenis peralatan tangkap yang telah disebutkan oleh van Kampen masih dapat dilengkapi dengan (6) linggis dan parang; (7) menangkap atau memungut ikan dengan tangan; dan akhir-akhir ini nelayan di Sulawesi Selatan juga telah melengkapi peralatan **tangkap mereka dengan (8) alat selam yang**

Sahda, Volume 1 Nomor 1 September 2006: 22 - 35
terdiri atas tabung dan kompresor.

Berbeda dari nefayan di Sulawesi Selatan, alat tangkap yang digunakan nelayan Jawa dan Madura terutama adalah pukat, Mereka mengenal berbagai jenis pukat yang berbeda. Sebagai contoh adalah perahu payang yang dilengkapi dengan tujuh jenis pukat, yaitu: pukat besar, peperek, krakat, arad, kopek, dedang, dan banton. Sebagian besar dari jenis-jenis pukat tersebut masih digunakan oleh sebagian besar nelayan di Jawa dan Madura hingga sekarang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa elemen tradisional masih bertahan dalam budaya kebaharian pada berbagai masyarakat nelayan di Indonesia dewasa ini. Sistem pengetahuan, kepercayaan, pranata atau lembaga, dan teknologi eksploitasi tradisional tetap terpelihara dan berfungsi. Fenomena ini bisa ditunjukkan antara lain pada komunitas nelayan Liang-liang di Pulau Sembilan dalam pengelolaan sumberdaya kawasan karang. Mereka tetap mempertahankan lokasi-lokasi dan sarang-sarang ikan yang dimiliki sejak dahulu dan tetap menggunakan pancing labuh. Meskipun dikelilingi oleh kelompok-kelompok nelayan pengguna bahan peledak dan bius serta para pengusaha dan agen eksportir ikan dan lobster segar dan hidup, namun mereka tetap mempertahankan sistem sistem tradisionalnya.

4. Dinamika Budaya Bahari dalam Konteks Eksternal dan Modern

Deskripsi mengenai sistem budaya bahari memperlihatkan bahwa dinamika budaya bahari terbentuk dari perilaku eksploitasi sumberdaya laut dan jaringan pemasarannya. Aktivitas pemancingan ikan, penggunaan bubu dan pukat serta pengelolaan bagang dan rumpon yang sudah berangsur fama dapat dilacak asal-usulnya dan perkembangannya dalam lingkup daerah, pulau, etnis, dan provinsi yang berdekatan. Hal yang sama juga tampak dalam pemasaran komoditas hasil laut yang terjadi dalam lingkup pasar lokal dan regional.

Berdasarkan keadaan tersebut maka dinamika budaya bahari, khususnya dalam komunitas nelayan di kawasan timur Indonesia, dapat dijelaskan dalam konteks internalnya.

Akan tetapi ketika dihadapkan pada berbagai gejala lain yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya laut, penjelasan semacam itu dirasakan belum cukup. Berbagai gejala seperti berkembangnya kemampuan nelayan lokal dalam proses produksi sejalan dengan modernisasi alat tangkap dan penguasaan pengetahuan baru mengenai berbagai komoditas hasil laut yang terkait dengan dan didorong oleh permintaan pasar, kemerosotan sumberdaya dan kerusakan lingkungan laut yang telah menjadi isu yang mendunia, dan merasuknya pengaruh organisasi nonpemerintah (ornop) baik lokal, nasional, maupun internasional merupakan beberapa di antara serangkaian faktor yang membentuk lingkungan eksternal. Faktor-faktor tersebut menciptakan pengaruh yang tidak bisa diabaikan terhadap kehidupan masyarakat nelayan di tingkat lokal. Hal ini menjadi alasan mengapa penjelasan tentang dinamika budaya bahari akan dapat dilakukan secara lebih baik dengan melihat dan mengaitkan masyarakat bahari dalam konteks eksternalnya.

Fenomena menyelam untuk mencari teripang di kalangan nelayan Bugis, Bajo, dan Makassar dari Sulawesi Selatan, sebagai contoh, sulit dipahami hanya dalam konteks sosial budaya lokal. Memang, pengetahuan dan praktik menyelam mencari teripang bagi mereka bukanlah suatu yang baru, karena hal itu bisa dilacak ke beberapa dekade bahkan beberapa abad ke belakang (*backward in time*). Praktik tersebut juga dapat dilacak dari jaringan perdagangan teripang ke luar (*outward in space*) hingga melampaui batas-batas negara seperti ke Singapura, Hongkong, Taiwan, RRC, Korea dan Jepang. Semula nelayan tidak banyak tahu dan memperhatikan spesies teripang, karena dianggap tidak bernilai. Biota ini mulai dicari ketika kapal-kapal dagang Cina yang ramai berlabuh di Pelabuhan Kota Somba Opu (pusat kota Kerajaan Makassar) di abad ke-17

Sobc/o/ *Volume I*, Nomor L September 2006: 22-35

mencari komoditas ekspor, termasuk hasil-hasil laut seperti teripang, agar-agar, sirip hiu, sarang burung walet, penyu, dan biota lain yang biasa ditukar langsung dengan pakaian, tembikar, porselin, dan lilin (Macknight, 1976). Meskipun spesies teripang disebut dengan nama-nama lokal namun permintaan pasarlah yang banyak menyumbang kepada pengayaan nama-nama spesies teripang hingga mencapai tidak kurang dari 40 jenis. Pengetahuan masyarakat lokal tentang cara menyortir teripang berdasarkan tingkat nilai tukar dari yang tertinggi hingga yang paling rendah juga dibentuk oleh kondisi pasar. Dalam hal ini, para pedagang Cina yang berkepentingan dengan komoditas teripang berperan besar dalam pembentukan pengetahuan dan kecakapan masyarakat setempat mengenai jenis-jenis dan cara penyortiran teripang.

Para pedagang Cina juga mempunyai kontribusi penting terhadap kemampuan nelayan untuk mengenali perilaku dan habitat teripang, pengaktifan fungsi sarana tangkap tradisional, pembentukan variasi baru dalam struktur kelompok kerja nelayan, hubungan-hubungan produksi, dan distribusi. Pedagang asing tersebut sebetulnya digerakkan oleh fungsi teripang bagi tubuh manusia. Teripang bagi orang Cina, selain merupakan santapan yang enak, juga digunakan sebagai bahan ramuan untuk menjaga kesehatan, nutrisi, vitalitas, memperpanjang umur, dan menambah keperkasaan laki-laki (Akimichi, 1996).

Peningkatan jumlah konsumen dan pedagang baik dari dalam maupun luar negeri yang terlibat dalam jaringan pemasaran komoditas tersebut mendorong terjadinya adopsi inovasi perangkat alat selam untuk mendukung kegiatan pencarian teripang. Sejak awal 1980-an para penyelam teripang dari Pulau Sembilan menggunakan tangki atau tabung **gas**, dan sejak 1990-an mereka mengganti tabung **gas** dengan kompresor. **Pada** mulanya pengusaha Cina dari Makassar membawa langsung pelatih selam dan merekrut dua atau tiga pembantu lokal untuk **dilatih menggunakan perangkat alat selam**

modern tersebut. Seiring dengan proses adopsi alat selam modern, berlangsung motorisasi perahu nelayan melalui pemasangan motor tempel (*outboard motor*). Dengan perkembangan lebih lanjut dilakukan usaha untuk meningkatkan kapasitas muat perahu dan kekuatan mesin yang dipasang pada bagian dalam badan perahu (*inboard motor*). Adopsi inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas muat perahu hanya dapat dilakukan dengan dukungan modal dalam skala yang lebih meningkat. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya proses penetrasi kapital, transformasi struktural kelompok *pongawa-sasi*, dan kemerosotan populasi teripang secara drastis dari berbagai spesies dan kerang (mutiara, /o/a) yang diambil dari kawasan *taka-taka* Pulau Sembilan.

Permintaan pasar yang tetap tinggi dan terkurasnya sumberdaya **laut** setempat lain pada akhirnya mendorong kelompok-kelompok penyelam dari Kambuno **dan** Kodingare terpaksa melakukan ekspansi area penangkapan ke tempat-tempat lainnya di Sulawesi Selatan dan berbagai provinsi lain, terutama di kawasan Timur Indonesia. Mereka bahkan melakukan penyelaman sampai ke Australia **di** akhir 1980-an hingga paruh pertama 1990-an. **Ketika** komoditas /obster dan ikan hidup laku di **pasar ekspor** (Hongkong dan Singapura), **sebagian** terbesar nelayan penyelam kembali **lagi** ke Pulau Sembilan dan beralih ke usaha *lobster* dan ikan hidup, **dan** dimulailah **sejarah** budaya tentang /obster dan ikan **hidup seperti kerapu, sunu, dan napoleon**.

Kedua komoditas tersebut pada mulanya melimpah di *taka-taka* Pulau Sembilan, karena *lobster* dan ikan hidup tidak mempunyai nilai tukar. Selain itu keduanya juga jarang dikonsumsi, **karena** masyarakat setempat mengangoapnya menjijikkan dan menjadi penyebab munculnya rasa malas. Hanya **dalam** waktu sekitar tujuh tahun populasi /obster dan beberapa jenis ikan hidup merosot tajam akibat penangkapan yang dilakukan oleh nelayan setempat dan nelayan pendatang. **Penyebabnya tidak lain adalah adanya**

Sabda, Volume I, Nomor 1, September 2006: 22 ' 35

permintaan *lobster* dan ikan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan itu berkaitan langsung dengan terjadinya perubahan pola makan konsumen kelas elite di negara-negara pengimpor. Mereka telah meninggalkan pola mengonsumsi hasil laut dalam kondisi segar yang sudah dihidangkan di meja restoran *sea food* dan beralih ke pola baru dengan memancing ikan atau *lobster* terlebih dahulu dari kolam-kotam penampungan lalu diolah dan disajikan oleh para pelayan. Cara ini selain dirasakan lebih menyenangkan juga menjamin pengunjung restoran untuk menikmati *sea food* sesuai dengan selera mereka. Pola makan baru di restoran-restoran Cina seperti ini di samping terkait dengan nilai kenikmatan santapan juga dapat memperkuat status sosial konsumennya (Akimichi, 1996).

Pada akhirnya kebijakan pemerintah harus disebut sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap penurunan populasi sumberdaya laut. Motorisasi perahu dan adopsi *gae* (istilah Bugis) atau *renge* (istilah Makassar), yaitu sejenis pukat apung raksasa (*purse seine*) yang merupakan teknologi andalan untuk menangkap ikan pelagis, terutama ikan layang, dikenal nelayan Sulawesi Selatan melalui promosi pemerintah pada 1970-an.

Penurunan populasi sumberdaya laut yang semakin parah dari waktu ke waktu telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan berbagai kebijakan guna menyelamatkan kelangsungan sumberdaya dan lingkungan laut. Salah satu contohnya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.7 tahun 1999 tentang larangan pengambilan dan perusakan terumbu karang di sepanjang perairan pantai Sulawesi Selatan dan cara-cara pengawasan oleh para penegak hukum di setiap wilayah tugas masing-masing. Pemerintah juga telah melakukan amandemen terhadap Peraturan Dirjen Perikanan No.HK.330/DJ.8259/95

tentang skala, lokasi, dan prosedur menangkap *napoleon wrasse*. Amandemen peraturan tersebut juga bertujuan membatasi eksploitasi berbagai spesies laut untuk komoditas ekspor. Beberapa spesies seperti teripang, kerang (mutiara, /o/a), rumput laut, sirip hiu, telur ikan, dan ikan serta *lobster* segar dan hidup hanya bisa dieksploitasi melalui keria sama dagang antarnegara dan diperkuat dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Usaha untuk menyelamatkan biota dan lingkungan laut juga dilakukan oleh ornop. LP3M dan WWF adalah contoh dua ornop yang aktif melancarkan gerakan penyadaran lingkungan di kalangan nelayan Sulawesi Selatan, antara lain dengan cara menyebarkan poster-poster yang memuat jenis-jenis biota laut yang langka dan dilindungi di seluruh dunia. Keberhasilan kampanye LP3M dan WWF tampak dari berhentinya kegiatan pengambilan batu karang dan penangkapan ikan *napoleon* ukuran tertentu, penyusutan, *kima*, *kerang mata tujuh*, *batu laga*, dan ikan hias oleh nelayan setempat di kawasan lindung Pulau Kapoposang (Pangkep) dan Taman Nasional Taka Bonerate. Peningkatan kesadaran nefayan tokal dan pemerintah daerah terhadap biota dan lingkungan laut juga tampak dari penolakan mereka terhadap penggunaan teknologi penangkapan ikan yang menyerupai pukat harimau mini. Peralatan tangkap ini bisa dengan cepat menguras berbagai jenis biota laut dan merusak kondisi dasar perairan. Akibat penolakan tersebut, pada akhir Desember 2002 semua perahu nelayan cantram Galesong Utara (Takalar) dari Sinjai yang dilengkapi dengan pukat harimau mini ditarik kembali atau dilarang beroperasi (Osseweijer, 2001).

Berbagai kebijakan pemerintah yang berisi **pelarangan kebanyakan** mengacu kepada rekomendasi yang **dihasilkan** melalui riset **ilmiah** oleh para peneliti **dari** perguruan tinggi. Demikian juga kebijakan yang berisi program pembangunan, misalnya kegiatan **ekonomi** baru bagi masyarakat nelayan seperti budidaya rumput laut, keramba penampungan ikan dan *lobster* hidup, budidaya teknik keramba, dan

Sabda, Volume // Nomor], September 2006: 22 - 35

penetasan telur serta pembesaran bibit bandeng dan udang, juga didasarkan pada hasil riset dan atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dari perguruan tinggi. Berdasarkan kenyataan itu dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi sebagai penggagas dan inovator teknologi merupakan konteks eksternal bagi proses dinamika sosial budaya masyarakat bahari, khususnya komunitas nelayan.

Sejak dekade 1990-an dinamika sosial budaya masyarakat nelayan mendapat pengaruh yang semakin kuat dari ornop seiring dengan meluasnya kehadiran mereka di desa-desa nelayan. Dengan paradigma *community-based management*, ornop mengembangkan visi dan misi yang ditujukan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan keterampilan penduduk, penumbuhan jiwa demokrasi, dan pelestarian lingkungan sosial budaya dan lingkungan fisik. Gagasan yang dibawa ornop biasanya diramu dari ide-ide yang berasal dari masyarakat lokal, hasil riset peneliti dari perguruan tinggi, dan pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam wacana global, khususnya yang muncul dalam "dunia ornop" sendiri. Di kawasan Taka Bonerate, ornop bertaraf internasional (WWF) menjalin kerja sama dengan ornop lokal (LP3M) untuk menggalang masyarakat nelayan dari berbagai desa di sekitar kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat nelayan dalam berbagai program kegiatan meliputi penyadaran lingkungan, pembentukan dan penguatan kelembagaan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan serta pengelolaan zona-zona perlindungan terumbu karang dan biota-biota langka berasosiasi karang. WWF juga menjalin kerjasama dengan ornop lokal untuk menyelamatkan kawasan-kawasan karang di Maluku dan Biak (Osseweijer, 2001).

5. Simpulan

Modernisasi dan globalisasi cenderung berdampak negatif terhadap kehidupan komunitas nelayan di berbagai tempat di Indonesia, misalnya berupa kemiskinan ekonomi sebagian terbesar masyarakat nelayan tradisional skala kecil, konflik di antara kelompok-ketompok nelayan, pengurusan populasi sumberdaya laut, dan kerusakan ekosistem laut terutama terumbu karang. Meskipun demikian, modernisasi dan globalisasi belum sampai memusnahkan beberapa bentuk kearifan lokal, di antaranya adalah sas/di Maluku, *panglima laut* di Aceh, dan teknik *rumpon* nelayan Mandar serta pranata *pongawa-sawi* di Sulawesi Selatan.

Berbagai pihak yang berkompeten seperti pemerintah, akademisi, ornop, dan lembaga donor perlu melakukan usaha-usaha untuk menemukan arah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan laut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah agar muncul kesadaran bersama bahwa sumberdaya laut relatif rentan terhadap ancaman, terutama yang bersumber dari perilaku manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi hasil laut. Usaha itu dapat dilakukan melalui penguatan hak-hak kepemilikan tradisional dan merevitalisasi lembaga-lembaga tradisional. Strategi itu memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pengembangan teknologi penangkapan, budidaya dan semi-budidaya, dan teknologi pascapanen serta pembangunan institusi pasar lokal, regional, nasional, dan global seharusnya juga tidak didominasi atau di bawah kendali - kekuatan eksternal. Oleh karena masyarakat bahari bersifat pragmatis, contoh nyata yang memberikan makna praktis bagi mereka niscaya akan dinilai tinggi dan diperebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson**, James M. 1981. "Anthropology of Fishing", dalam *Annual Review of Anthropology* (editor Bernard J. Siegel, Alam R. Beals, dan Stephen A. Tyier). Vol. 10, him. 275-316.
- Akimichi, Tomoya. 1991. *Coastal Foragers in Transition*. Ethnological Studies Series No. 42. National Museum of Ethnology.
- Andersen, R.** dan Cato Wadel. 1982. "North Atlantic Fishermen: Anthropological Essays on Modern Fishing", dalam *Newfoundland Social and Economic Research*. Memorial University of Newfoundland.
- Bernard**, H. Russel. 1994, *Ffesearch Made in Anthropology*. London: Sage
- Publications, Borofsky, Robert, ed.. 1994. Accessing Cultural Anthropology**. New York: Me Graw-Hill.
- Firth, Raymond. 1975. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Ginkel, Rob van dan Jojada Verrips. 1988. "Introduction", dalam *Maritime Anthropological Study* vol. 1 no. 2.
- Goodenough, Ward H.. 1994. "Toward A Working Theory of Culture", dalam *Accessing Cultural Anthropology* (editor Robert Borofsky). New York: McGraw-Hill.
- Hamid.Abu. 2003. *Pelestarian Budaya Kebaharian Masyarakat Sulawesi Selatan: Suatu Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harris, Man/in. 1968. *7770 Rise of Anthropological Theory*. New York: Crowell.
- Horridge, Adrian. 1986. *Sailing Craft of Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Indar, Nur dan Lampe. 2002. "Sistem-sistem Tradisional sebagai Institusi dalam Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Pesisir". Laporan Penelitian.
- Kampen, P. N. van. 1909. "De Hulpmiddelen der Zeevisscherij op Java en Madoera in Gebruik", dalam *Mededeelingen Uitgande van het Departement van Landbow* no.9, Batavia: G. Coif & Co.
- Keesing, Roger M.. 1994. "Theory of Culture Revisited", dalam *Accessing Cultural Anthropology* (editor Robert Borofsky). New York: McGraw- Hill.
- Koentjaraningrat. 1980, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Masyhuri, 1996. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Osseweijer. Manon. 2001. *Taken at the Flood: Marine Resource Use and Management in the Aru Islanders {Maluku, Eastern Indonesia}*. Leiden: Universiteit te Leiden.
- Palsson, Gisli. 1991. *Coastal Economies, Cultural Accounts: Human Ecology and Icelandic Discourse*. Manchester: Manchester University Press.
- Schoorl. J.W.. 1986. *Power, Ideology, and Change in the Early State of Buton*.
- Ushijima dan Cynthia Neri Zayas. 1991-1993. *Fishers of the Visayas: Visayas Maritime Anthropological Studies*. CSSP Publication. University of the Philippines.
- Vayda, Andrew P..1992. "Action and Consequences as Objects of Explanation in Human Ecology", dalam *Environment. Technology, and Society* vol 51, him 2-7.
- Welvaartcommissie. 1905. *Overzicht van Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Vischteelt en Visscheren Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen. Onderzoek naar Mindere Welvaart der Inlandsche evolking op Java en Madoera*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Zerner, Charles. 1994. Tracking Sasi: The Transformation of A Central Moluccan Reef Management Institution in Indonesia**. Connecticut: West Hartford.